

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Pentingnya ketersediaan infrastruktur membuat pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur, pemerintah juga membutuhkan suatu anggaran dana yang sangat besar untuk merealisasikan rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Pembangunan infrastruktur baik berupa jalan raya, jaringan listrik, komunikasi, perumahan dan jaringan air bersih sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah.

Pentingnya ketersediaan infrastruktur membuat pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur, pemerintah juga membutuhkan suatu anggaran dana yang sangat besar untuk merealisasikan rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Ironisnya, bahwa kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyediakan dana infrastruktur jauh dari kata cukup, hal ini dapat dilihat dari rendahnya dana dari luar negeri. Infrastruktur yang baik juga dapat

meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Pembangunan infrastruktur baik berupa jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan listrik, komunikasi, perumahan dan jaringan air bersih sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah.

Berdasarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, infrastruktur ditempatkan sebagai *sector vital* dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat tiap tahunnya. Keadaan infrastruktur Indonesia secara keseluruhan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dapat dianggap belum maju, semenjak krisis ekonomi porsi pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur juga memiliki kecenderungan menurun. Meskipun sejak desentralisasi pemerintah pusat sudah memindahkan beberapa tanggungjawab ke pemerintah daerah namun pengeluaran infrastruktur pada tingkat pemda juga tidak meningkat banyak untuk menggantikan penurunan pengeluaran pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur dimasa mendatang perlu dibangun secara optimal, sehingga integrasi serta konsolidasi dari pembangunan dapat secara maksimal dimanfaatkan dan dibangun dengan biaya seefisien mungkin. Di samping itu perlu juga diingat bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga tidak hanya membutuhkan biaya investasi yang besar, tetapi juga biaya operasi dan perawatan yang besar dalam penggunaannya. Infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam jangka

pendek pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi. Dalam jangka menengah dan panjang infrastruktur akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait.

Infrastruktur dapat menjadi jawaban bagi wilayah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, karena ketersediaan infrastruktur dapat membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung tumbuhnya pusat ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan Nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (sukirno,2006).

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah indonesia

untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja. Sifat dan jenis infrastruktur yang diperlukan suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik alam dan pola persebaran penduduk yang khas pada daerah tersebut. Infrastruktur bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan. Selain itu, keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pembangunan SDM. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur

merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (*Saptowasono, 2012*).

Capello (2007) menyatakan hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dimana infrastruktur merupakan faktor dalam penentuan daya saing dan produktivitas. Infrastruktur ekonomi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional, sedangkan infrastruktur sosial berdampak langsung pada kualitas hidup dan modal manusia, sehingga akan berpengaruh pada produksi hanya dalam jangka panjang dan efeknya tidak hanya berdampak pada area yang dibangun infrastruktur sosial tersebut. Penelitian Gibson dan Olivia (2009) membuktikan bahwa kualitas dari infrastruktur jalan dan listrik memengaruhi lapangan kerja dan pendapatan dari usaha nonpertanian masyarakat pedesaan di Indonesia. Kurangnya akses terhadap infrastruktur jalan dan listrik serta rendahnya kualitas infrastruktur menghambat usaha nonpertanian rumah tangga pedesaan. Rumah tangga cenderung tidak memiliki usaha nonpertanian dan berpendapatan di bawah usaha nonpertanian apabila mereka tinggal di daerah yang lebih terpencil, memiliki kualitas jalan yang buruk, tidak ada akses listrik, dan sering menderita pemadaman listrik.

Masyarakat di beberapa kecamatan di kabupaten belu juga banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur khususnya infrastruktur jalan, listrik dan air

bersih yang saat ini dirasakan sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Belu juga sangat membutuhkan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jalan raya yang belum memadai sangat mengganggu arus lalu lintas jika masyarakat pergi bekerja atau mengirimkan barang yang akan dijual ke pasar domestik ataupun diekspor.

Perkembangan infrastruktur dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Kabupaten Belu cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2002-2022. Infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik di Kabupaten Belu mengalami perkembangan, tabel dibawah ini menunjukkan bagaimana perkembangan infrastruktur jalan dan listrik tersebut di Kabupaten Belu periode tahun 2002-2022.

Tabel 1.1
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Belu

Tahun	Kondisi Jalan Baik (km)	Kondisi Jalan Rusak (km)
2002	502,17	55,18
2003	435,29	-
2004	650,55	95,55
2005	315,47	-
2006	180,65	255,04
2007	175,85	235,14
2008	370,00	-
2009	170,559	208,980
2010	312,32	227,06
2011	316,49	228,52
2012	320,61	224,40
2013	435,29	138,577
2014	102,387	132,332
2015	142,237	119,217
2016	139,32	126,83
2017	159,507	115,93
2018	115,610	132,830
2019	278,15	130,102
2020	277,640	129,974
2021	285,542	129,921
2022	293,542	122,019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 panjang jalan menurut kondisi dan tingkat pemerintahan di Kabupaten Belu tahun 2002-2022 dari kondisi jalan yang baik setiap tahun berfluktuasi yang mengalami naik turun atau berubah-ubah.

Tabel 1.2
Pemakaian Daya listrik di Kabupaten Belu
Tahun 2002-2022

Tahun	Pemakaian Listrik (Kwh)
2002	11,183,461
2003	15,435,530
2004	13,697,916
2005	13,697,916
2006	16,629,638
2007	11,155,809
2008	12,827,197
2009	14,443,832
2010	12,312,522
2011	26,569,816
2012	30,593,136
2013	32,871,820
2014	37,017,255
2015	45,122,436
2016	52,592,830
2017	56,571,181
2018	57,347,319
2019	41,814,250
2020	61,952,420
2021	76,124,183
2022	34,805,115

Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dimana pemakaian listrik di Kabupaten Belu ini mengalami fluktuasi atau naik turun setiap tahunnya, pemakain energi listrik paling terendah terlihat ada tahun 2002 dan 2007 sebesar 11,155,809 kwh dan jumlah pemakaian paling tertinggi terlihat pada tahun 2021 76.124.183 kwh.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat

dengan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan efek yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintah daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Menurut data yang penulis dapatkan di Kabupaten Belu periode 2002-2022 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2002	4,20
2003	5,61
2004	5,79
2005	4,99
2006	4,66
2007	5,32
2008	5,44
2009	4,35
2010	4,49
2011	4,29
2012	5,25
2013	6,04
2014	5,57
2015	5,49
2016	5,76
2017	5,78
2018	5,60
2019	5,38
2020	0,40
2021	1,75
2022	3,19

Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi paling rendah terlihat pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,40% dan paling tertinggi terlihat pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,04%. Dari definisi diatas ditemukan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu mengalami fluktuasi pertahun dari tahun 2002-2022.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Kualitas Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Belu”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan air secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu ?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan air secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan di atas mengacu pada dua pokok permasalahan maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu
2. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik dan air secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah ilmu dan wawasan tentang pengaruh pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu

2. Bagi Lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi program studi ekonomi pembangunan

3. Pihak/ peneliti lain

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak yang tertarik melakukan penelitian dimasa yang akan datang